

OPINI BPK-RI

atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Kabupaten Malang | Tahun Anggaran 2023



Wajar Tanpa Pengecualian | **WTP**



Berdasarkan kutipan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Nomor: 61.A/LHP/XVIII.SBY/05/2024 dan Nomor: 61.B/LHP/XVIII.SBY/05/2024 tanggal 30 April 2024, hal ini juga disampaikan dalam kutipan Surat Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: 122/S-HP/XVIII.SBY/05/2024 tanggal 2 Mei 2024 berikut ini:



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Nomor : 122/S-HP/XVIII.SBY/05/2024
Lampiran : Dua Buku
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2023

Sidoarjo, 2 Mei 2024

Yth. Bupati Malang
di
Kepanjen

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2023, yang terdiri atas Neraca dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, serta Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2023 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan
Wajar Tanpa Pengecualian.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Kabupaten Malang tersebut merupakan Opini WTP yang kesepuluh secara berturut-turut.

KABUPATEN MALANG

Meraih Penghargaan

OPINI WTP

(Wajar Tanpa Pengecualian)

10x

Berturut-turut

Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Tahun Anggaran 2023

Sidoarjo
2 Mei 2024



KARYADI

Kepala Perwakilan BPK
Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Drs. H. M. SANUSI, M.M.

Bupati Malang